



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 456/XII/TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka perlu ada penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui perencanaan program kerja pengawasan yang sistematis dan komprehensif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan: Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2024, 700.1/3013/SJ, dan HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : PKPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026.
- KETIGA : PKPT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Matriks Program Kerja Pengawasan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- b. Penjabaran Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2026 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

- KEEMPAT : Inspektur berkewajiban menyampaikan ikhtisar hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA/DPPA Inspektorat Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 31 DESEMBER 2025



BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 456 /XII/ TAHUN 2025
: 31 DESEMBER 2025
: PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2026

MATRIKS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2026

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Ruang Lingkup	Irtan Pengampu	Jadwal Rencana												JML Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Output	Tingkat Risiko	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		PJ	WPJ .PM	PT	KT	AT	Jml			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)												(8)	(9)						(10)	(11)	
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal																											
Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																											
1	Audit Kinerja Program Penyelenggaraan Jalan	Audit	a. Tujuan : Menilai keberhasilan pelaksanaan program-program sasaran strategis di Perangkat Daerah terkait dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan tata kelola 3E serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan b. Sasaran : Program Penyelenggaraan Jalan Tahun 2025	Dinas PUTR	Lintas Irtan													25	1	1	1	1	4	8	1	Lap	Sangat Tinggi
2	Audit Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit	a. Tujuan : Menilai keberhasilan pelaksanaan program-program sasaran strategis di Perangkat Daerah terkait dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan tata kelola 3E serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan b. Sasaran : Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025	Dinas BPKPD	Lintas Irtan													25	1	1	1	1	4	8	1	Lap	Sangat Tinggi
3	Audit Operasional Dinas Pendidikan	Audit	a. Tujuan : Meyakini pelaksanaan tugas fungsi Perangkat Daerah/unit kerja telah memenuhi unsur efisien dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku serta memberikan saran perbaikan b. Sasaran : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi berikut Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sarana Prasarana dan Sistem Pengendalian Intern	Dinas Pendidikan	Lintas Irtan													25	1	1	1	1	4	8	1	Lap	Sangat Tinggi
4	Audit Operasional Sekretariat Daerah	Audit	a. Tujuan : Meyakini pelaksanaan tugas fungsi Perangkat Daerah/unit kerja telah memenuhi unsur efisien dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku serta memberikan saran perbaikan b. Sasaran : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi berikut Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sarana Prasarana dan Sistem Pengendalian Intern	Sekretariat Daerah	Lintas Irtan													25	1	1	1	1	4	8	1	Lap	Sangat Tinggi

MATRIKS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2026

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Ruang Lingkup	Irbn Paengampu	Jadwal Rencana												JML. Hari/Tim	Proyeksi HP					Jumlah Output	Tingkat Risiko			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		PJ	WPJ /PM	PT	KT	AT			Jml		
5	Evaluasi SAKIP	Evaluasi	a. Tujuan : Memperoleh Informasi tentang Implementasi AKIP; Menilai Tingkat Implementasi AKIP; Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi AKIP b. Sasaran : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan dokumen pendukung AKIP	Perangkat Daerah	Irbn I, Irbn II, Irbn III													20	1	3	3	3	12	22	3	Lap		
Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																												
1	Opname Kas dan Barang Persediaan TA 2025	Reviu	a. Tujuan : untuk memperoleh keyakinan "terbatas pada penyajian saldo kas" bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian data stok opname dengan fisik barang. b. Sasaran : Register tutup kas akhir tahun dan hasil stock opname atas barang persediaan	Dinas Kesehatan, RSUD Lakipadada, BPKPD, 22 Puskesmas	Irbn I, Irbn II, Irbn III, Lintas Irbn													20	1	5	7	7	28	48	7	Lap		
2	Monitoring atas Pencatatan Saldo Persediaan Akhir dan Proses Tutup Kas Akhir Tahun Perangkat Daerah TA. 2026	Monitoring	a. Tujuan : untuk memperoleh keyakinan "terbatas pada penyajian saldo kas" bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian data stok opname dengan fisik barang. b. Sasaran : Register tutup kas akhir tahun dan hasil stock opname atas barang persediaan	Perangkat Daerah	Irbn I, Irbn II, Irbn III, Lintas Irbn													20	1	5	11	11	33	61	11	Lap		
3	Opname Dana BOS TA 2025	Reviu	a. Tujuan : untuk memperoleh keyakinan "terbatas pada penyajian saldo kas" Dana BOS. b. Sasaran : Register tutup kas akhir tahun Dana BOS	SD dan SMP	Irbn I, Irbn II, Irbn III, Lintas Irbn													20	1	5	11	11	33	61	11	Lap		
4	Audit Ketaatan Dana BOS	Audit	a. Tujuan : untuk memperoleh keyakinan memadai, penggunaan dana BOS telah sesuai ketentuan. b. Sasaran : Dana BOS	SD dan SMP	Irbn I, Irbn II, Irbn III, Lintas Irbn													25	1	4	4	4	16	29	4	Lap	Sangat Tinggi	
5	Audit Ketaatan Dana BOK TA 2025	Audit	a. Tujuan : untuk memperoleh keyakinan memadai pengelolaan dana pada PKM telah sesuai ketentuan. b. Sasaran : Dana BOK	Puskesmas	Irbn I, Irbn II, Irbn III, Lintas Irbn													25	1	4	4	4	16	29	4	Lap		

MATRIKS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2026

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Ruang Lingkup	Irbis Pengampu	Jadwal Rencana												JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Output	Tingkat Risiko	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		PJ	WPJ /PM	PT	KT	AT	Jml			
6	Audit Pendapatan Asli Daerah (Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah)	Audit	a. Tujuan: Menilai atau menguji efektivitas dan produktivitas Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam melakukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan tata kelola yang baik serta memperkuat struktur keuangan daerah sebagai salah satu tolak ukur/indikator cermin kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan daerah. b. Sasaran: mendapatkan informasi tentang pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan basis data untuk pengelolaan PAD pada Pemerintah daerah	BPKPD dan Perangkat Daerah Teknis Lainnya	Lintas Irbis													25	1	1	1	1	4	8	1	Lap	
Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja																											
1	Reviu RKPD Perubahan 2026	Reviu	Tujuan: Memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian rumusan substansi antar bab dalam dokumen rancangan akhir Perubahan RKPD 2026	Tim Penyusun RKPD Perubahan	Lintas Irbis													15	1		1	1	5	8	1	Lap	
2	Reviu RKPD 2027	Reviu	Tujuan: Memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian rumusan substansi antar bab dalam dokumen rancangan akhir RKPD 2027	Tim Penyusun RKPD	Lintas Irbis													15	1		1	1	5	8	1	Lap	
3	Reviu Renja Perubahan 2026	Reviu	a. Tujuan : Memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa Laporan Renja Perubahan 2026 telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Sasaran : 1. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; 2. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan 3. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.	Perangkat Daerah	IRBAN I, II, III, Lintas Irbis													15	1		4	4	20	29	4	Lap	

MATRIKS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2026

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Ruang Lingkup	Irbas Pengawasan	Jadwal Rencana												JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Output	Tingkat Risiko
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		PJ	WPJ /PM	PT	KT	AT	Jml		
4	Reviu Renja 2027	Reviu	a. Tujuan : Mendapatkan keyakinan terbatas bahwa Renja 2027 disusun sesuai dengan pedoman b. Sasaran : 1. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; 2. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan 3. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.	Perangkat Daerah	IRBAN I, II, III, Lintas Irbas													15	1		4	4	20	29	4	Lap
5	Reviu KUA-PPAS Perubahan 2026	Reviu	a. Tujuan : memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian KUA dan PPAS dengan aturan yang berlaku. b. Sasaran : 1. Pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; 2. Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: 1) Pendapatan daerah; 2) Belanja daerah; dan 3) Pembiayaan daerah	Tim Penyusun KUA-PPAS Perubahan	Lintas Irbas													15	1		1	1	5	8	1	Lap
6	Reviu KUA-PPAS 2027	Reviu	a. Tujuan : memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian KUA dan PPAS dengan aturan yang berlaku. b. Sasaran : Dokumen Rancangan Akhir Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Tim Penyusun KUA-PPAS RPKD	Lintas Irbas													15	1		1	1	5	8	1	Lap
7	Reviu RKA Perubahan 2026 berbasis SIPD (e-Reviu)	Reviu	Tujuan : memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi Perubahan RKA-SKPD sesuai dengan KUA, PPAS, RKBMD, SHS, dan dilengkapi dokumen pendukung Perubahan RKA-SKPD. Sasaran : perangkat daerah/unit kerja	Perangkat Daerah	IRBAN I, II, III, Lintas Irbas													25	1		4	4	20	29	4	Lap

MATRIKS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2026

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Ruang Lingkup	Irbn Pengampu	Jadwal Rencana												JML.	Proyeksi HP						Jumlah	Tingkat
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Hari/Tim	PJ	WPJ /PM	PT	KT	AT	Jml	Output	Risiko
8	Reviu RKA 2027 berbasis SIPD (e-Reviu)	Reviu	Tujuan : memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan bahwa perumusan dokumen RKA Perangkat Daerah Tahun 2027 telah sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan anggaran. Sasaran : Perangkat daerah/unit kerja	Perangkat Daerah	IRBAN I, II, III, Lintas Irban													25	1		4	4	20	29	4	Lap
9	Reviu SSH dan ASB	Reviu	a. Tujuan: Memberikan keyakinan terbatas bahwa Standar Harga Satuan (SHS) dan Analisis Standar Biaya (ASB) pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan dimanfaatkan dengan optimal dalam perencanaan dan penganggaran APBD. b. Sasaran : Kesesuaian SHS dan ASB pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	Tim Penyusun SSH dan ASB	Lintas Irban													15	1		2	2	8	13	2	Lap
10	Reviu LPPD 2025	Reviu	a. Tujuan : Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah b. Sasaran : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025	Tim Penyusun LPPD	Lintas Irban													25	1	1	1	1	4	8	1	Lap
11	Reviu Dana Alokasi Khusus	Reviu	a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Sasaran : DAK Fisik	Perangkat Daerah Teknis dan Pemerintah Daerah	Lintas Irban													15	12		12	12	48	84	12	Lap
12	Reviu Dana Alokasi Umum	Reviu	a. Tujuan : 1. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Sasaran : Realisasi DAU	Perangkat Daerah Teknis dan Pemerintah Daerah	Lintas Irban													20	3		3	3	12	21	3	Lap

MATRIKS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2026

Matriks Prognosis																										
No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Ruang Lingkup	Irbn Pengampu	Jadwal Rencana												JML Hari/Tim	Proyeksi HP					Jumlah Output	Tingkat Risiko	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		PJ	WPJ /PM	PT	KT	AT			Jml
1	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Persiapan)	Reviu	a. Tujuan : Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan aturan yang berlaku. b. Sasaran : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 (Tahap Persiapan)	Tim Penyusun LKPD	Lintas Irbn												15	1	1	1	1	4	8	1	Lap	
2	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Pelaksanaan)	Reviu	a. Tujuan : Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan aturan yang berlaku. b. Sasaran : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 (Tahap Pelaksanaan)	Tim Penyusun LKPD	Lintas Irbn												25	1	1	1	1	4	8	1	Lap	
3	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2025 Tahun Anggaran (Pelaporan)	Reviu	a. Tujuan : Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan aturan yang berlaku. b. Sasaran : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 (Tahap Pelaporan)	Tim Penyusun LKPD	Lintas Irbn												15	1	1	1	1	4	8	1	Lap	
Sub Kegiatan Pengawasan Desa																										
1	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Lembang	Audit	a. Tujuan : Untuk Memperoleh keyakinan memadai, pengelolaan keuangan lembang telah sesuai ketentuan. b. Sasaran : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Lembang	Pemerintah Lembang (40 Pemerintah Lembang)	IRBAN I, II, III, Lintas Irbn												30	1	3	8	8	32	52	8	Lap	Sangat Tinggi
2	Pengawasan Aset Lembang	Monitoring	a. Tujuan : Untuk Memperoleh keyakinan terbatas pengelolaan aset lembang telah sesuai ketentuan. b. Sasaran : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Lembang	Pemerintah Lembang (8 Pemerintah Lembang)	IRBAN I, II, III, Lintas Irbn												15	1	8	4	4	16	33	4	Lap	
Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal																										
1	Pendampingan Pengawasan BPK	Pengawasan Lainnya	Melakukan join audit / pendampingan	Pemerintah Daerah	Lintas Irbn												25	2	2		2	10	16	2	Lap	
2	Pendampingan Pengawasan BPKP	Pengawasan Lainnya	Melakukan join audit / pendampingan	Pemerintah Daerah	Lintas Irbn												10	1	1	1	1	4	8	1	Lap	
3	Pendampingan Pengawasan Inspektorat Provinsi	Pengawasan Lainnya	Melakukan join audit / pendampingan	Pemerintah Daerah	Lintas Irbn												5	1	1	1	1	4	8	1	Lap	
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																										
1	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah	Monitoring	Memastikan bahwa rekomendasi Inspektorat Daerah telah ditindaklanjuti	Perangkat Daerah dan Pemerintah Lembang	Lintas Irbn												25	4	4	4	4	16	32	4	Lap	
2	Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Lainnya (Provinsi/BPKP)	Pengawasan Lainnya	Memastikan bahwa rekomendasi APIP Lainnya (Provinsi/BPKP) telah ditindaklanjuti	Entitas Pemeriksaan	Lintas Irbn												15	2	2	2	2	8	16	2	Lap	
3	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Monitoring	Memastikan bahwa rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti	Pemerintah Daerah	Lintas Irbn												25	2	2	2	2	8	16	2	Lap	

MATRIKS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2026

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Ruang Lingkup	Irbas Pengampu	Jadwal Rencana												Proyeksi HP						Jumlah Output	Tingkat Risiko		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JML Hari/Tim	PJ	WPJ /PM	PT	KT	AT			Jml	
Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																											
Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																											
1	Sidang Majelis tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Pengawasan Lainnya	Melakukan tuntutan perbendaharaan dan TGR	LHP	Tim TP-TGR																					2	Lap
2	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) / Penilaian Kerugian Negara/Daerah	Pengawasan Lainnya	Menyelesaikan Kerugian Daerah dengan menyusun kronologis terjadinya kerugian, mengumpulkan bukti pendukung, serta menghitung jumlah kerugian.	LHP, Pertimbangan Manajemen	Irbas Investigasi																					2	Lap
3	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah	Audit	Menghitung nilai kerugian keuangan negara untuk memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik	LHA Investigasi	Irbas Investigasi													25	2	2	2	2	8	16	2	Lap	
Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu																											
1	Telaah Pengaduan Masyarakat/Permintaan APH/Permintaan Pihak Berwenang	Pengawasan Lain	a. Tujuan : Melaporkan pengelolaan aduan yang masuk ke Inspektorat b. Sasaran : Pengelolaan aduan di Inspektorat	Pemerintah Daerah	Lintas Irbas													5	5	5	5	5	15	35	5	Lap	
2	Audit Investigasi / Pengawasan Dugaan Penyimpangan	Audit	a. Tujuan : Memberikan keyakinan memadai terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan b. Sasaran : Pembuktian suatu permasalahan / identifikasi kelemahan sesuai tematik	Pemerintah Daerah	Irbas Investigasi													30	4	4	4	4	16	32	4	Lap	
3	Pemberi Keterangan Ahli	Pengawasan Lain	Memberikan keterangan ahli	Kasus Hukum	Irbas Investigasi																					2	Dok
4	Keamanan SPBE (Audit Internal)	Audit	a. Tujuan : memberikan keyakinan memadai bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dilaksanakan sesuai peraturan dan rencana Pemerintah Kabupaten Tana Toraja b. Sasaran : Aspek infrastruktur, aspek keamanan dan aspek aplikasi SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Lintas Irbas													25	1	1	1	1	4	8	1	Lap	
5	Reviu HPS	Reviu	a. Tujuan : memastikan bahwa nilai HPS sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, ruang lingkup pekerjaan, dan kewajiban perpajakan b. Sasaran : Kelengkapan dan keselarasan HPS dengan Dokumen Pendukung HPS, Keselarasan dan kesesuaian perhitungan HPS dengan DED	10 Paket Strategis	Lintas Irbas													5	10		10	10	40	70	10	Lap	
6	Probit Audit	Audit	a. Tujuan : untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan probity requirement b. Sasaran : Paket Strategis	5 Paket Strategis	Lintas Irbas													10	5	5	5	5	20	40	5	Lap	

MATRIKS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2026

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Ruang Lingkup	Irbn Pangampu	Jadwal Rencana												JML Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Output	Tingkat Risiko
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		PJ	WPJ /PM	PT	KT	AT	Jml		
7	Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah	Monitoring	Memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan sesuai dengan rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan	Perangkat Daerah dan Pemerintah Lembang	Sekretariat				1	1	1	1	1				1	5	12	12	12	12	24	72	12	Lap
8	Audit Penyaluran Hibah	Audit	a. Tujuan : Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan hibah telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Sasaran : dokumen pengajuan hibah, penyaluran hibah dan dokumen terkait lainnya.	Perangkat Daerah Teknis	Lintas Irbn													20	1		1	1	4	7	1	Lap
9	Audit Penyaluran Bantuan Sosial	Audit	a. Tujuan : Meyakini pelaksanaan kegiatan Bansos telah sesuai ketentuan yang berlaku serta memberi saran perbaikan. b. Sasaran : Pelaksanaan Kegiatan	Perangkat Daerah Teknis	Lintas Irbn													20	1		1	1	4	7	1	Lap
10	Audit Penyaluran Bantuan Keuangan	Audit	a. Tujuan : Meyakini pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan telah sesuai ketentuan yang berlaku serta memberi saran perbaikan. b. Sasaran : Pelaksanaan Kegiatan	Perangkat Daerah Teknis	Lintas Irbn													20	1		1	1	4	7	1	Lap
11	Audit Penggunaan Anggaran Honorarium	Audit	a. Tujuan : Memberikan keyakinan memadai bahwa penerimaan honorarium telah didukung dengan dokumen yang memadai. b. Sasaran : Penerimaan honorarium	Perangkat Daerah Teknis	Lintas Irbn													20	1		1	1	4	7	1	Lap
12	Audit Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas	Audit	a. Tujuan : Memberikan keyakinan memadai bahwa penerimaan perjalanan dinas telah didukung dengan dokumen yang memadai. b. Sasaran : Penerimaan perjalanan dinas	Perangkat Daerah Teknis	Lintas Irbn													20	1		1	1	4	7	1	Lap
13	Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Audit	a. Tujuan : Memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Pengadaan Langsung telah sesuai ketentuan. b. Sasaran : PBJ dengan metode Pengadaan Langsung	PBJ dengan metode Pengadaan Langsung (PL) pada Perangkat Daerah Teknis tertentu yang berisiko tinggi	Lintas Irbn													20	1		1	1	4	7	1	Lap
14	Audit Pengadaan Barang dan Jasa secara e-purchasing	Audit	a. Tujuan : Memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Purchasing telah sesuai ketentuan. b. Sasaran : PBJ dengan metode e-Purchasing	Perangkat Daerah	Lintas Irbn													20	1		1	1	4	7	1	Lap
15	Reviu Pelayanan Publik	Reviu	a. Tujuan : Mendapatkan keyakinan terbatas terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan b. Sasaran : Aspek Transparansi, Aspek Regulasi dan Kebijakan, Aspek Akuntabilitas	Perangkat Daerah Teknis	Lintas Irbn													15	1	4	4	4	16	29	4	Lap

MATRIKS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2026

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Ruang Lingkup	Irbas Pengampu	Jadwal Rencana												JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Output	Tingkat Risiko	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		PJ	WPJ /PM	PT	KT	AT	Jml			
16	Reviu Manajemen Aparatur Sipil Negeri (ASN)	Reviu	a. Tujuan : reviu atas kesesuaian persyaratan dalam proses promosi, rotasi, mutasi, termasuk pengisian JPT. serta Implementasi sistem merit. b. Sasaran: Tatakelola ASN	BKPSDM	IRBAN I													15	1		1	1	4	7	1	Lap	
17	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	Reviu	a. Tujuan: mendapatkan gambaran mengenai tata kelola BMD di Pemerintah Kabupaten Tana Toraja b. Sasaran: 1. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2. penggunaan; 3. pemanfaatan; 4. pengamanan dan pemeliharaan; 5. pemindahtanganan.	BKPD dan Perangkat Daerah	Lintas Irbas													15	1		1	1	5	8	1	Lap	
18	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Reviu/Evaluasi/Monitoring/Pengawasan Lainnya/Consulting	Permintaan manajemen/pimpinan/amanat peraturan yang sifatnya mendesak	Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah	Lintas Irbas													15	2	2	2	2	6	14	2	Lap	
19	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Audit	Permintaan manajemen/pimpinan/amanat peraturan yang sifatnya mendesak	Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah	Lintas Irbas													25	7	7	7	7	28	56	7	Lap	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan																											
Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																											
1	Perumusan Program Kerja Pengawasan Tahunan	Pengawasan Lainnya	Menyusun rancangan keputusan Bupati terkait PKPT	Inspektorat Daerah	Lintas Irbas													15	2	2	2	2	8	16	2	Dok	
2	Evaluasi Program Kerja Pengawasan Tahun 2026	Pengawasan Lainnya	Melakukan evaluasi atas realisasi Program Kerja Pengawasan Tahun 2026 untuk selanjutnya <i>ditelpon sebagai masukan sebagai PKPT</i>	Realisasi PKPT Inspektorat Daerah	Lintas Irbas													10	2	2	2	2	8	16	2	Dok	
3	Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Pengawasan Lainnya	Melakukan penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Realisasi PKPT Inspektorat Daerah	Sekretariat													10	1	1	1	1	4	8	1	Dok	
4	Perumusan Infrastruktur Pengawasan Intern	Pengawasan Lainnya	Merumuskan rancangan kebijakan teknis terkait Infrastruktur Pengawasan Intern	Inspektorat Daerah	Lintas Irbas													5	5	5	5	5	20	40	5	Dok	
Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan																											
1	Perumusan Kebijakan teknis	Pengawasan Lainnya	Merumuskan rancangan kebijakan teknis terkait Fasilitas Pengawasan	Pemerintah Daerah	Lintas Irbas													10	5	5	5	5	20	40	5	Dok	
2	Harmonisasi dan Fasilitas Rancangan Kebijakan	Pengawasan Lainnya	Melakukan Harmonisasi dan Fasilitas Rancangan Kebijakan teknis yang telah disusun ke Unit Kerja/Instansi berwenang	Pemerintah Daerah	IRBAN I																				5	Dok	
Kegiatan Asistensi dan Pendampingan																											
Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																											
1	Bimbingan Teknis Pengelolaan Risiko	Pengawasan Lainnya	Pemberian Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Risiko	Pemerintah Daerah	Lintas Irbas																				1	Dok	
2	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	Pengawasan Lainnya	Pemberian Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Lembang	Lintas Irbas																				4	Dok	
3	Evaluasi Risk Register (RR)	Evaluasi	Memperoleh Informasi Perangkat Daerah mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengelolaan risiko	Perangkat Daerah (8 Perangkat Daerah)	IRBAN I, II, III, Lintas Irbas													10	1	4	4	4	16	29	4	Lap	

MATRIKS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2026

[illegible]

MATRIKS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2026

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Ruang Lingkup	Irtan Pengampu	Jadwal Rencana												JML Hari/Tim	Proyeksi HP					Jumlah Output	Tingkat Risiko	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		PJ	WPJ /PM	PT	KT	AT			Jml
3	Diklat Teknis Substantif	Pengembangan Kompetensi	Pemenuhan JamLat	Inspektorat Daerah	APIP																				144	Sert
4	Diklat Sertifikasi Non JF (CGCAE, CGA, CISA, DLL)	Pengembangan Kompetensi	Pengembangan Profesi	Inspektorat Daerah	APIP																				7	Sert
5	Pelatihan Kantor Sendiri	Pengembangan Kompetensi	Sharing is caring	Inspektorat Daerah	APIP																				5	Dok
JUMLAH																		1155							394	Dok

Keterangan :

1. RMP : Rencana Mulai Penugasan
2. RPL : Rencana Penyelesaian Laporan
3. MR : Manajemen Risiko
4. PJ : Penanggung Jawab
5. WPJ : Wakil Penanggungjawab
6. PM : Pengendali Mutu
7. PT : Pengendali Teknis
8. KT : Ketua Tim
9. AT : Anggota Tim
10. LHP : Laporan Hasil Pengawasan
11. 3E : Efektif Efisien Ekonomis
12. Jadwal rencana bersifat tentatif sesuai ketersediaan SDM APIP



BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG